

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rantau Baduh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rantau Baduh Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Rantau Baduh Kabupaten Barito Kuala yaitu:

“Mewujudkan peningkatan pelayanan publik, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama para penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa yang akuntabel dan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Rantau Baduh Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Rantau Baduh Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta

pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Rantau Baduh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Sungai Gampa, Januari 2020

Camat Rantau Badauh

JULIANNOR FATAHILLAH, SSTP
NIP 198407052002121001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Rantau Badauh telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Rantau Badauh dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) indikator dengan capaian kedua indikator sesuai target.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Rantau Badauh

Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20	1	101,20				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97,5					1	97,5

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Landasan Hukum	5
1.5. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja 2019	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
3.1. Capaian Kinerja	11
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	13
C. Akuntabilitas Keuangan	18
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2017-2022	7
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2018	8
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	11
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai	11
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Kecamatan Rantau Badauh	12
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Kecamatan Rantau Badauh Berdasarkan Kategori	13
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator	14
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Kemcatan Rantau Badauh	14
Tabel 3.2.3 Capaian Kiernja Sasaran Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019	14
Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Rantau Baduh	15
Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu	16
Tabel 3.2.6 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian target Renstra	16
Tabel 3.2.7 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	17
Tabel 3.3.1 Kompoisis Belanja Kecamatan Rantau Badauh Tahun Anggaran 2019	18
Tabel 3.3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Rantau Badauh	19

Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	20
Tabel 3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Rantau Badauh Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rantau Badauh :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Rantau Badauh Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Rantau Badauh yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Rantau Badauh adalah sebagai berikut:

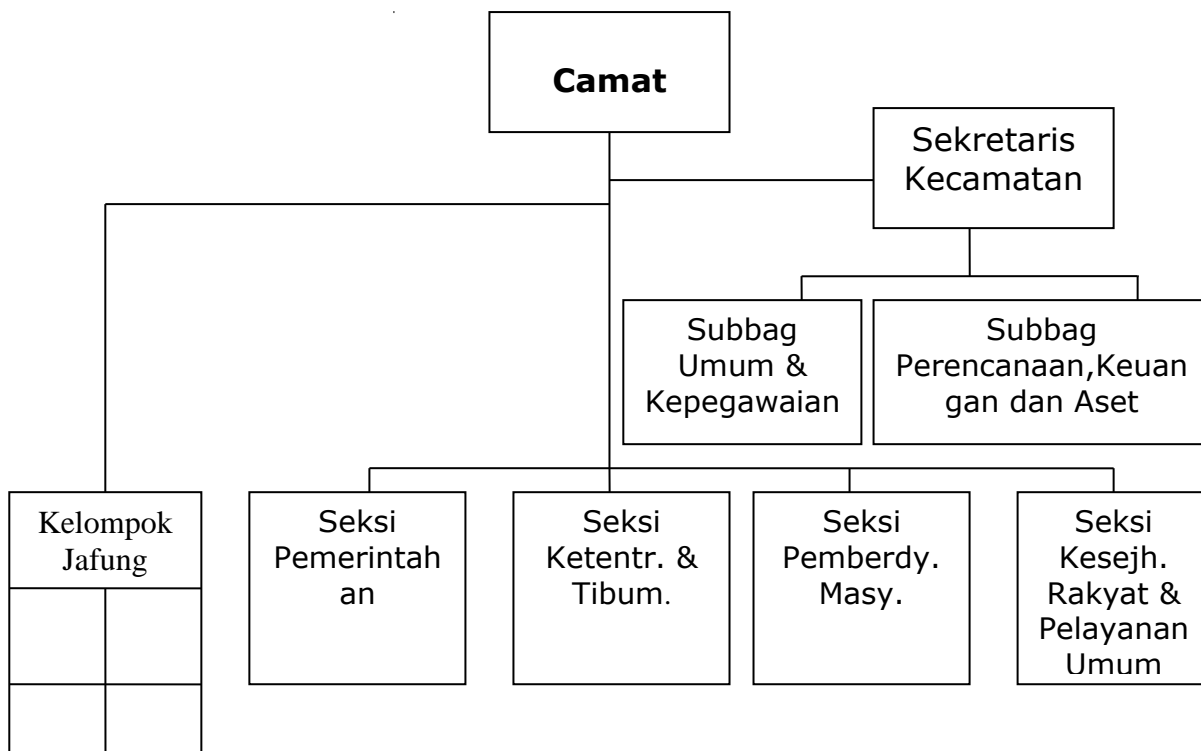
1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rantau Badauh sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Rantau Badauh Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah berdampak neposisi peran dan status kecamatan yang bersifat ganda yaitu atributif dan delegatif.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Rantau Badauh permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan , khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan.

Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Rantau Badauh ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2017; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2017 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langka-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Rantau Badauh tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERTANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Rantau Badauh merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Rantau Badauh.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/267 / KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Rantau Badauh, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Rantau Badauh
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Baik	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,75	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	14.436.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	2.730.000
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.730.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	12.350.000
					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	3.000.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	18.575.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	44.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	80	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	9.852.500
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.500.000

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat didasarkan dari pelayanan berdasarkan 7 (Tujuh) program yang mendukung Indikator Kinerja Utaman yang pertama dengan dilakukannya survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan untuk pencapaian Prosentase Desa Dengan Administrasi yang Baik ditargetkan 80 % dari 9 (Sembilan) desa yang ada di Kecamatan Rantau Badauh.

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh 9 (Sembilan) program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 113.173.500,-**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Rantau Badauh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Rantau Badauh Nomor 13 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Rantau Badauh tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Rantau Badauh
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,75	83,75	101,20
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	80	78	97,5

Dari 2 (dua) sasaran strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja capaian indikator kinerja utama yang dicapai pada indikator pertama mencapai 83,75 % berdasarkan survey IKM melebihi target yang ditentukan. Sedangkan indikator kedua mencapai 97,5 %.

Tabel 3.1.2
Capaian IKU Kecamatan Rantau Badauh
Berdasarkan Persentase
Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	
>100	Melebihi target	1

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan persentase dimana 1 (satu) indikator mencapai persentase lebih dari 100 % dengan predikat melebihi target dan 1 (satu) indikator persentase kurang dari 100 % dengan predikat tidak Tercapai.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Rantau Badauh
Berdasarkan Kategori
Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian keduanya masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Rantau Badauh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rantau Badauh berdasarkan Keputusan Camat Rantau Badauh, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rantau Badauh, telah ditetapkan 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis Dan Jumlah Indikator

Kecamatan Rantau Badauh

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20	Melebihi target
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97,5	Tidak tercapai

Tabel 3.2.3

Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20					Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97,5					Sangat Baik

Tabel 3.2.4

Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Rantau Badauh

Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20	1	101,20				
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97,5					1	97,5

**Sasaran Strategis 1.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

**Sasaran Strategis 2.
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**

Untuk melihat capaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa”, maka ada 1 indikator kinerja yang digunakan, yaitu prosentase desa dengan administrasi desa yang baik.

Tabel 3.2.5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
			Capaian	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	100,91	101,20	0,29	
2.	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	100	97,5	(2,5)	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi peningkatan capaian tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan untuk indikator sasaran 2 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi	Target	Capaian	Ket.
			2019	Ahir Renstra	(%)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	83,75	83,50	100,29	
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	78	95	82,10	

Capaian sasaran 1 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra mencapai lebih dari 100 % karena capaian 2019 sudah mencapai target yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Capaian sasaran 2 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra mencapai 82,10 % karena capaian 2019 masih belum mencapai target masih kurang 17,9 % yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Tabel 3.2.7

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator SASARAN	Satuan	Relisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,75			
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	78			

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Rantau Badauh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 652.955.210,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 547.703.784,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 83,95 %.

Komposisi belanja Kecamatan Rantau Badauh untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

**Komposisi Belanja Kecamatan Rantau Badauh
Tahun Anggaran 2019**

(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	296.072.400,-	270.302.416,-	91,30
2	Belanja Tidak Langsung	356.882.810,-	277.410.332,-	77,73
Jumlah		652.955.210,-	547.703.784,-	83,88

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 49,35 % terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sisanya sebesar 50,65 % disumbangkan belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 99.201.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.451.000,- atau 95,21 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2

**Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis**

**dan Indikator Kinerja Kecamatan Rantau Badauh
Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	97.821.000	95.805.632	97,93
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	15.352.500	5.980.000	38,95
	Jumlah	113.173.500	101.785.632	89,93

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Rantau Badauh pada tahun 2019.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20	95.805.632	97,93
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97,5	5.980.000	38,95
	Jumlah	2	99,32	101.785.632	89,93

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Rantau Badauh.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 2 sasaran menunjukkan pencapaian lebih dari 100% yaitu sebanyak 1 sasaran. Dan 1 sasaran tidak memenuhi target sasaran. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

**Pada Kecamatan Rantau Badauh
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	101,20	97,93	3,27
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1	97,5	38,95	58,55
	Jumlah	2	99,32	89,93	61,82

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 hasil reviu yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2019** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 101,20% atau lebih dari target
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.5% atau tidak mencapai target

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 99,35% atau tidak mencapai target. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Selanjutnya keberhasilan/ kegagalan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang kompeten dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Masih lemahnya kesadaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator indeks kepuasan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu.
2. Melakukan pembinaan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat

Sedangkan keberhasilan/kegagalan capaian Indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan terdapat kegiatan baru yang tentunya hal baru juga untuk dipelajari.

2. Kurangnya kesadaran aparaturnya desa untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

Laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. Di masa yang akan datang Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja serta menyempurnakan laporan kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja.